

DPRD Parimo Tetapakan Perda APBD Tahun 2019



DPRD PARIMO - Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parigi Moutong tahun anggaran 2019 resmi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong.

Penetapan Perda tersebut disepakati seluruh anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD tentang Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) mengenai Raperda APBD Tahun 2019 di ruang rapat paripurna Kantor sementara DPRD, Jumat (21/12/2018).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, I Ketut Mardika, didampingi Wakil Ketua, Abdul Haris Lasimpara, dan dihadiri Segenap Anggota DPRD serta dari pihak eksekutif dihadiri oleh Bupati Parigi Moutong yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Parigi Moutong, H. Ardi, para Asisten, Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN di lingkup Pemkab Parigi Moutong.

Pelapor Banggar, I Made Yastina menjelaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diterima oleh tim Asistensi Propinsi untuk melakukan Evaluasi terhadap Raperda tersebut, Yang kemudian Hasil dari Evaluasi tersebut kembali kami bahas kembali untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan dengan hasil Evaluasi di Gubernur Sulawesi Tengah.

Made Yastina yang juga ketua Komisi II DPRD itu, dalam laporan banggar yang ia sampaikan, juga menjelaskan Ringkasan terkait Raperda APBD Kab. Parimo 2019 hasil evaluasi Gubernur Sulteng yang telah dibahas, disesuaikan dan disepakati Bahwa

Jumlah Pendapatan Daerah yang Sebelumnya sebesar Rp. 1.603.536.344.400; mendapatkan kenaikan sebesar Rp. 7.696.417.168 sehingga Total Jumlah Pendapatan untuk APBD 2019 sebesar Rp. 1.611.232.761.572.

Untuk Belanja Daerah, Made Yastina menerangkan bahwa Jumlah Belanja Daerah yang sebelumnya Sebesar Rp. 1.593.063.597.203 bertambah sebesar Rp. 7.696.462.448 sehingga Total Jumlah Belanja Daerah pada APBD 2019 menjadi Rp. 1.600.760.059.651. Lanjutnya Untuk Jumlah Belanja Tidak Langsung yang sebelumnya sebesar Rp. 963.747.083.211 bertambah sebesar Rp. 6.336.256.491 sehingga Jumlah Belanja Tidak Langsung pada 2019 sebesar Rp. 970.083.348.702 sedangkan Belanja Langsung yang sebelumnya sebesar Rp. 629.316.513.992 bertambah sebesar Rp. 1.362.196.457 sehingga Jumlah Belanja Langsung pada 2019 Menjadi Rp. 630.678.710.449. Lebih lanjut Untuk Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 2.441.871.079 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 12.914.573.000 sedangkan Jumlah Pembiayaan netto sebesar Rp. 10.472.701.921.

Selain menyampaikan Ringkasan APBD 2019 hasil asistensi di tingkat propinsi itu, ia juga Menambahkan bahwa Laporan APBD secara lengkap serta Total Pagu anggaran 2019 untuk setiap OPD telah disajikan yang terlampir pada laporan banggar tersebut.

Ketua DPRD I Ketut Mardika, dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa rapat paripurna ini, merupakan proses lanjutan dari tahapan-tahapan pembicaraan sebelumnya Mengenai R APBD 2019. Dimana, Raperda yang dibahas bersama Antara Banggar DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) kata Ketut Mardika, merupakan rencana keuangan tahunan yang nantinya ketika ditetapkan akan berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi, mengingat betapa pentingnya peran APBD tersebut.

Lanjutnya, penetapan persetujuan Raperda APBD Kabupaten Parigi Moutong pada kesempatan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah dan menjadi wewenang daerah yang pelaksanaannya tidak lain, dari dan atas pendapatan anggaran belanja daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. "Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Perda," ujarnya

Sebelum mendapat persetujuan untuk ditetapkan, terjadi perdebatan antar anggota DPRD yang mengakibatkan Rapat Paripurna tersebut sedikit alot pada babakan tanya jawab antar Anggota DPRD, Dan sampai akhirnya Laporan Banggar Mengenai Hasil Evaluasi Gubernur Prop. Sulteng terhadap Raperda APBD 2019 mendapat persetujuan untuk ditetapkan dari seluruh Anggota DPRD yang hadir pada Rapat Paripurna tersebut.

Penetapan Perda APBD 2019 itu ditandai dengan Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 oleh Sekretaris DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah, serta dilanjutkan dengan pendatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Eksekutif oleh Sekretaris Daerah dan Legislatif oleh Pimpinan DPRD.

Bupati Parigi Moutong diwakili Sekretaris Daerah H. Ardi, dalam sambutannya menyampaikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perda APBD 2019 tersebut "bahwa sebelum Raperda ini ditetapkan, legislatif dan eksekutif telah melaksanakan pembahasan yang sistematis dan terencana, guna menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan serta pembangunan, yang dituangkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang ada di setiap perangkat daerah".Terangnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Yang telah bekerja dalam penyelesaian perda APBD 2019 tersebut "Dengan ditetapkannya Raperda tentang APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2019 dan sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama Pemkab Parigi Moutong menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang telah selesai membahas, memberikan masukan, koreksi dan saran positif terhadap penyempurnaan Raperda ini, sehingga ditetapkan menjadi perda".Jelasnya

Rapat Paripurna tersebut berakhir dan ditutup pada pukul 23.46 wita, yang kemudian dilanjutkan dengan agenda Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Ke - III Tahun Sidang 2018. (Rifai / Humas DPRD)